

Lampiran 1
Indikator Rumusan Masalah

P 1.1 Dampak Pungutan Liar (Pungli)

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Praktek pungli dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi	Kuncoro, Rahajeng (2005) Kemenkopolhukam (2016)
2.	Praktek pungli dapat menimbulkan kerusakan pada tatanan masyarakat	Apriansyah, (2018) Purwadi, dkk. (2018) Jannah, dkk. (2018)
3.	Masyarakat dirugikan dengan adanya pungli	Kuncoro, Rahajeng (2005) Tugas et.al (2012)
4.	Pungli dapat menghambat jalannya pembangunan nasional	Ikhsan. M (2012) Purwadi, dkk. (2018)
5.	Adanya praktek pungli dapat menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap layanan public yang diberikan oleh pemerintah	Kurnianingrum (2012) Fathya (2018)

P 1.2 Faktor Penyebab Pungutan Liar (Pungli)

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Potensi dan daya tarik suatu daerah dapat memicu timbulnya praktek pungli	Ikhsan. M (2012)
2.	Pungli terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang	Kuncoro, Rahajeng (2005) Ramadhani (2017) Apriansyah. (2018)
3.	Ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban dapat menimbulkan praktek pungli	Ramadhani (2017) Apriansyah. (2018) Purwadi, dkk. (2018)
4.	Mentalitas dari penyelenggara layanan public dapat menjadi penyebab melakukan pungli	Ramadhani (2017) Apriansyah. (2018) Purwadi, dkk. (2018)

No	Pertanyaan	Referensi
5.	Budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus di suatu lembaga dapat menyebabkan pungli dianggap sebagai hal yang biasa	Tugas et.al (2012) Ramadhani (2017) Apriansyah. (2018) Purwadi, dkk. (2018)
6.	Lemahnya control dan pengawasan dari atasan dan atau badan pengawas dapat memicu adanya pungli	Ramadhani (2017) Apriansyah. (2018) Purwadi, dkk. (2018)
7.	Adanya mata rantai penghasilan antar level jabatan dapat menyebabkan pungli masih terus terjadi	Apriansyah. (2018)

P.2 Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli)

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Dalam upaya pemberantasan pungli di seluruh Indonesia, Satgas Saber Pungli dapat menjangkau semua area di setiap daerah	Apriansyah. (2018)
2.	Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat mengidentifikasi area-area yang terindikasi rawan pungli	Purwadi, dkk. (2018)
3.	Satgas Saber Pungli dapat melakukan pengawasan terhadap area-area yang terindikasi rawan pungli	Apriansyah. (2018) Purwadi, dkk. (2018)
4.	Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat mencegah terjadinya praktek pungli	Apriansyah. (2018) Purwadi, dkk. (2018)
5.	Satgas Saber Pungli dapat menindak pelaku praktek pungli	Purwadi, dkk. (2018)

P.3 Sistem *Whistle-Blowing* pada Pelaporan Praktek Pungutan Liar

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan Saber Pungli dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat	LPSK (2011) Apriansyah. (2018)
2.	Sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan telah dilengkapi dengan petunjuk mekanisme pelaporan secara jelas	KNKG (2008) LPSK (2011)
3.	Sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan memungkinkan <i>whistle-blower</i> mendapatkan feedback dan progress atas laporan praktek pungli yang dilaporkannya	KNKG (2008) LPSK (2011)
4.	Sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan memungkinkan instansi terlapor mendapatkan feedback atas laporan terjadinya praktek pungli	KNKG (2008) LPSK (2011) Wardani (2017)
5.	Apakah Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap <i>whistle-blower</i> yang melaporkan praktek pungli?	Lestari dan Yaya (2017) Wardani (2017) LPSK (2011)

P.4 Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam Pemberantasan Pungli

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Pelaksanaan OTT telah ditetapkan dengan standar operasional prosedur yang jelas	Apriansyah. (2018) Hikmawati (2018) Ramadani (2018)
2.	Pelaksanaan OTT melibatkan pihak-pihak terkait (misal : Kejaksaan dan Polri)	Purwadi, dkk. (2018) Hikmawati (2018)
3.	OTT diperlukan dalam untuk menemukan kesesuaian bukti laporan dugaan praktek pungli untuk diproses di pengadilan	Apriansyah. (2018) Hikmawati (2018)
4.	OTT dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap laporan dugaan praktek pungli	Apriansyah. (2018) Hikmawati (2018)

P.5 Pengaruh Satgas Saber Pungli Terhadap Intensi Melakukan Pungli

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat memberikan efek psikologis “merasa dawasi” bagi aparat yang bertugas di area rawan ungli	Apriansyah. (2018) Purwadi, dkk. (2018)

P.6 Pengaruh Sistem *Whistle-Blowing* yang Efektif Terhadap Intensi Melakukan Pungli

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Dengan telah berjalannya sistem <i>whistle-blowing</i> secara efektif dapat mengurungkan niat melakukan praktek pungli	Lestari, Yaya (2018)

P.7 Pengaruh Operasi Tangkap Tangan Terhadap Intensi Melakukan Pungli

No	Pertanyaan	Referensi
1.	Dengan adanya OTT mampu memberikan “efek jera” bagi aparat yang bertugas di area rawan ungli	Apriansyah. (2018)

Lampiran 2

SEMI STRUCTURE INTERVIEW PROTOCOL

Judul Penelitian : Analisa Pengaruh Pembentukan Satgas Saber Pungli, Sistem *Whistle Blowing*, dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Praktek Pungutan Liar

Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas pembentukan Satgas Saber Pungli, penyediaan system *whistle-blowing*, dan pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap intensi melakukan praktek pungutan liar (pungli). Adapun rangkaian pertanyaan sebagai bahan wawancara disajikan sebagai berikut :

P.1. Praktek Pungutan Liar (Pungli)

P.1.1. Apakah menurut anda praktek pungli yang masih terjadi secara masiv berdampak negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat ?

Kemungkinan :

1. Apakah pungli dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi?
2. Apakah pungli dapat menimbulkan kerusakan pada tatanan masyarakat?
3. Apakah masyarakat dirugikan dengan adanya pungli?
4. Apakah pungli dapat menghambat jalannya pembangunan nasional?
5. Apakah pungli menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat pada layanan publik yang diberikan oleh pemerintah?
6. Adakah hal-hal lain yang menjadi akibat dari adanya pungli?

P.1.2. Menurut anda, factor-faktor penting manakah yang dapat menyebabkan oknum melakukan praktek pungli?

Kemungkinan :

1. Apakah potensi dan daya tarik suatu daerah dapat memicu timbulnya pungli?
2. Apakah pungli terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang?
3. Apakah ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban dapat menimbulkan pungli?
4. Apakah mentalitas dari penyelenggara layanan public dapat menjadi penyebab melakukan pungli?
5. Apakah budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus di suatu lembaga dapat menyebabkan pungli dianggap sebagai hal biasa?

6. Apakah lemahnya pengawasan dari atasan dan atau badan pengawas dapat memicu adanya pungli?
7. Apakah adanya mata rantai penghasilan antar jabatan dapat menyebabkan pungli terus terjadi?
8. Adakah hal-hal lain yang menjadi factor penyebab terjadinya pungli?

P.2. Satgas Saber Pungli

P.2.1. Apakah menurut anda peran Satgas Saber Pungli efektif dalam pemberantasan praktek pungli?

Kemungkinan :

1. Apakah Satgas Saber Pungli dapat menjangkau semua area di setiap daerah di Indonesia?
2. Apakah Satgas Saber Pungli dapat mengidentifikasi area-area terindikasi rawan pungli?
3. Apakah Satgas Saber Pungli melakukan pengawasan terhadap area-area yang terindikasi rawan pungli?
4. Apakah Satgas Saber Pungli dapat menindak pelaku praktek pungli?
5. Adakah hal-hal lain yang menjadi indikator keefektifan Satgas Saber Pungli dalam pemberantasan pungli?

P.3. Whistle-Blowing System

P.3.1. Apakah menurut anda penerapan sistem *whistle-blowing* dalam rangka pelaporan praktek pungli telah berjalan secara efektif?

Kemungkinan :

1. Apakah sistem *whistle-blowing* yang disediakan Saber Pungli dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat?
2. Apakah sistem *whistle-blowing* yang disediakan dilengkapi dengan petunjuk pelaporan secara jelas?
3. Apakah sistem *whistle-blowing* yang disediakan memungkinkan *whistle-blower* mengetahui progress praktek pungli yang dilaporkannya?
4. Apakah sistem *whistle-blowing* yang disediakan memungkinkan instansi terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya praktek pungli di wilayah kerjanya?
5. Apakah Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap *whistle-blower* yang melaporkan praktek pungli?

6. Adakah hal-hal lain yang menjadi indikator keefektifan sistem *whistle-blowing* dalam pemberantasan pungli?

P.4. Operasi Tangkap Tangan (OTT)

- P.4.1. Apakah menurut anda pelaksanaan OTT dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan praktek pungli telah berjalan secara efektif?

Kemungkinan :

1. Apakah OTT telah ditetapkan dengan standar operasional prosedur yang jelas?
2. Apakah OTT melibatkan pihak-pihak terkait? (misal : Kejaksaan dan Polri)
3. Apakah OTT diperlukan dalam untuk menemukan kesesuaian bukti laporan dugaan praktek pungli untuk diproses di pengadilan?
4. Apakah OTT dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap laporan dugaan praktek pungli?
5. Adakah hal-hal lain yang menjadi indicator keefektifan pelaksanaan OTT dalam pemberantasan pungli?

P.5. Pengaruh Satgas Saber Pungli Terhadap Intensi Pungli

- P.5.1. Apakah dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat memberikan efek psikologis “merasa dawasi” bagi aparat yang bertugas di area rawan pungli?
- P.5.2. Adakah pengaruh lain setelah dibentuknya Satgas Saber Pungli terhadap tatanan kerja aparatur layanan public?

P.6. Pengaruh Sistem Whistle Blowing yang Efektif Terhadap Intensi Pungli

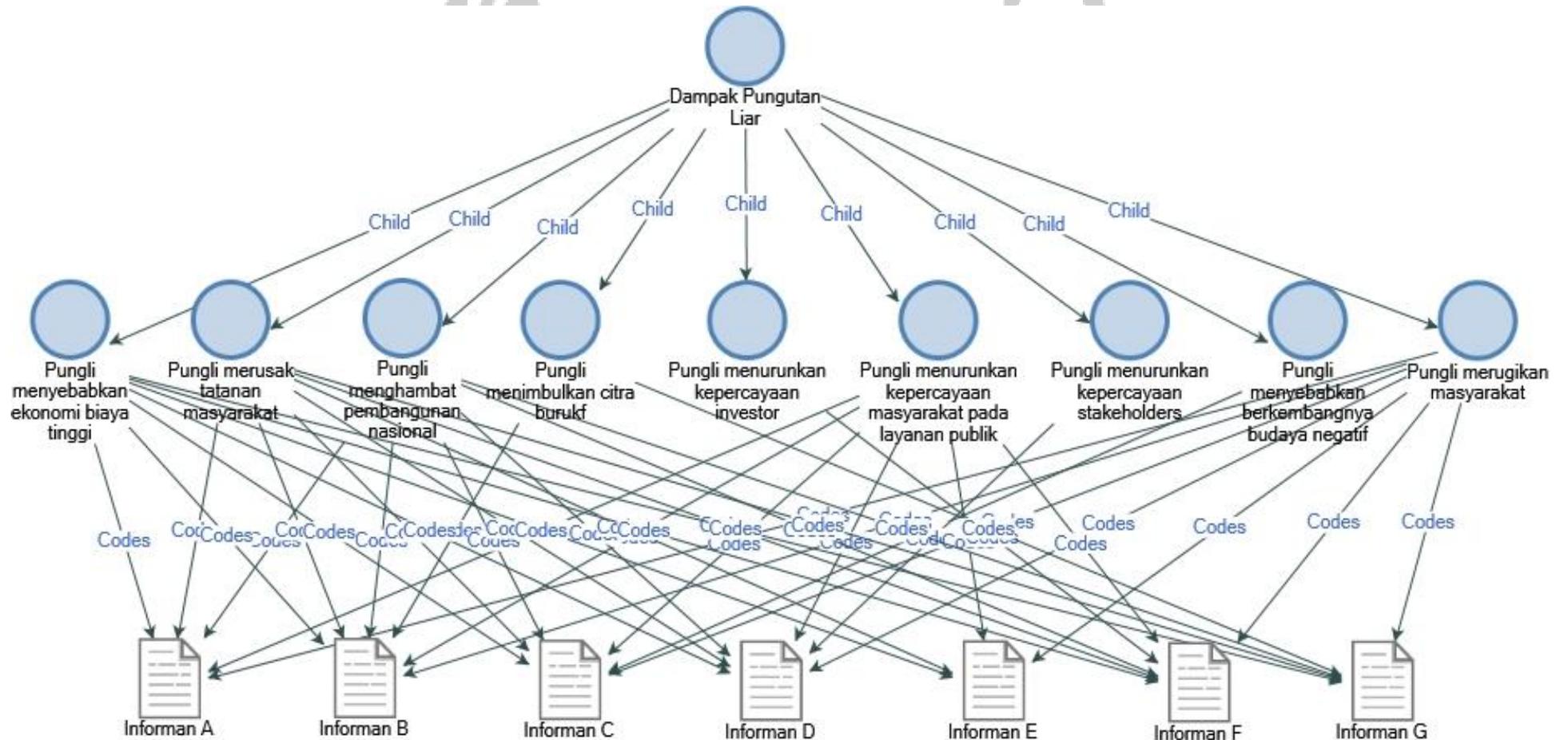
- P.6.1. Apakah peningkatan peran aktif masyarakat dalam melapor melalui sistem *whistle-blowing* yang telah berjalan efektif dapat mengurungkan niat para oknum melakukan praktek pungli?
- P.6.2. Adakah pengaruh lain adanya sistem *whistle-blowing* yang efektif terhadap pungli?

P.7. Pengaruh Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Intensi Pungli

- P.7.1. Apakah dengan adanya OTT mampu memberikan “efek jera” bagi bagi aparat yang bertugas di area rawan pungli?
- P.7.2. Adakah pengaruh lain adanya OTT terhadap pungli?

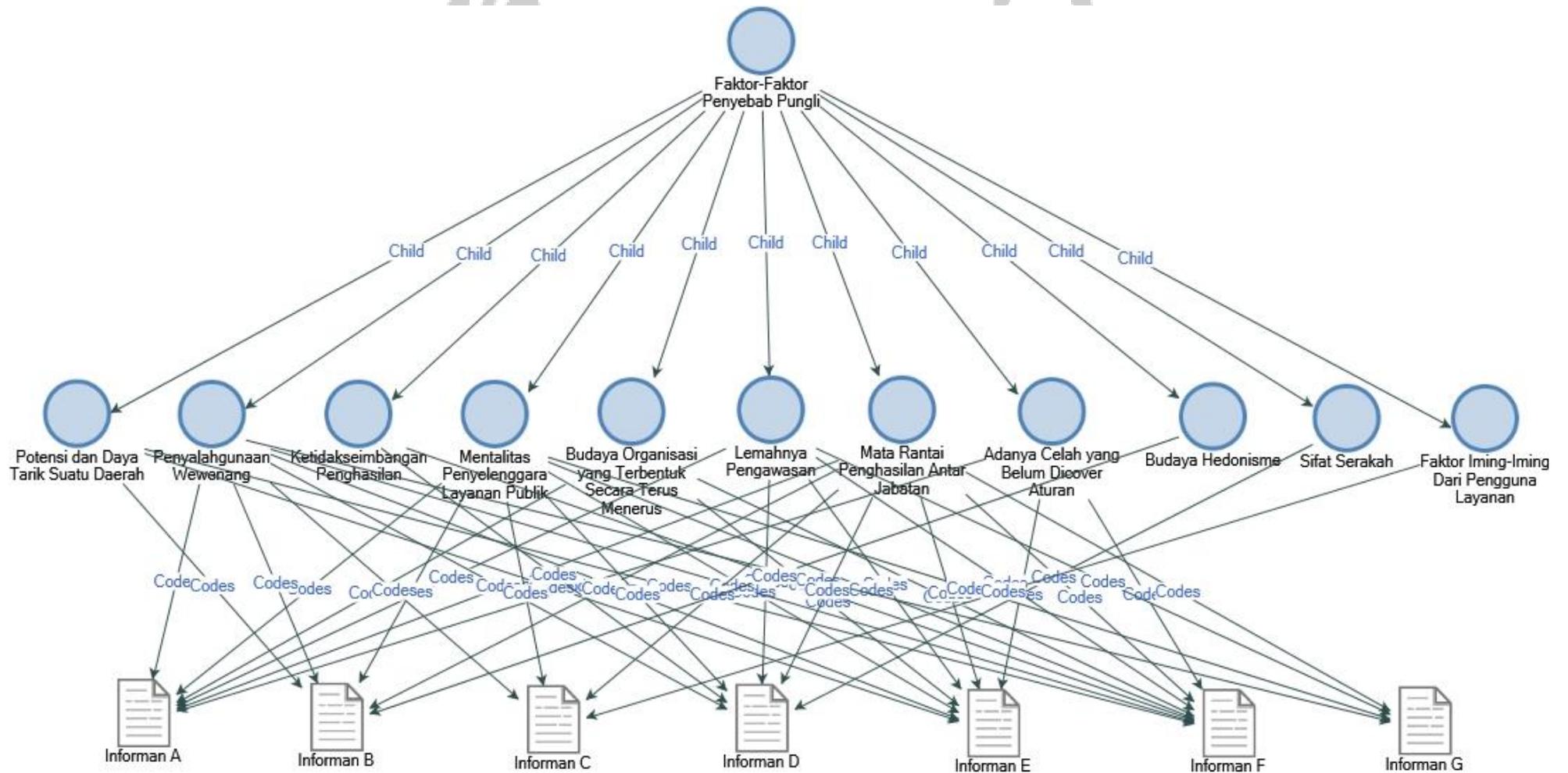
Lampiran 3

Model Penelitian Lapangan - Dampak Praktek Pungutan Liar



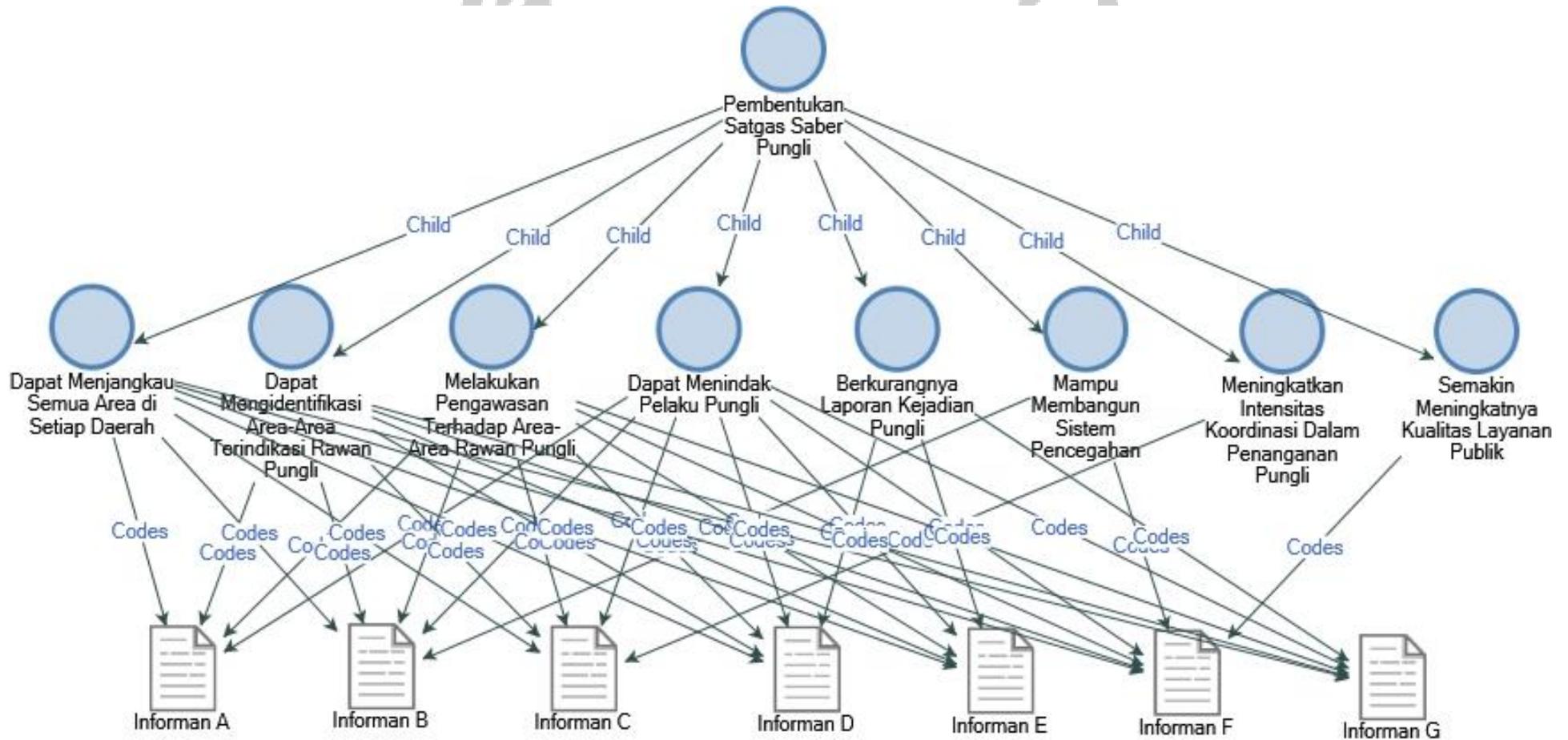
Lampiran 4

Model Penelitian Lapangan – Faktor-Faktor Penyebab Pungutan Liar



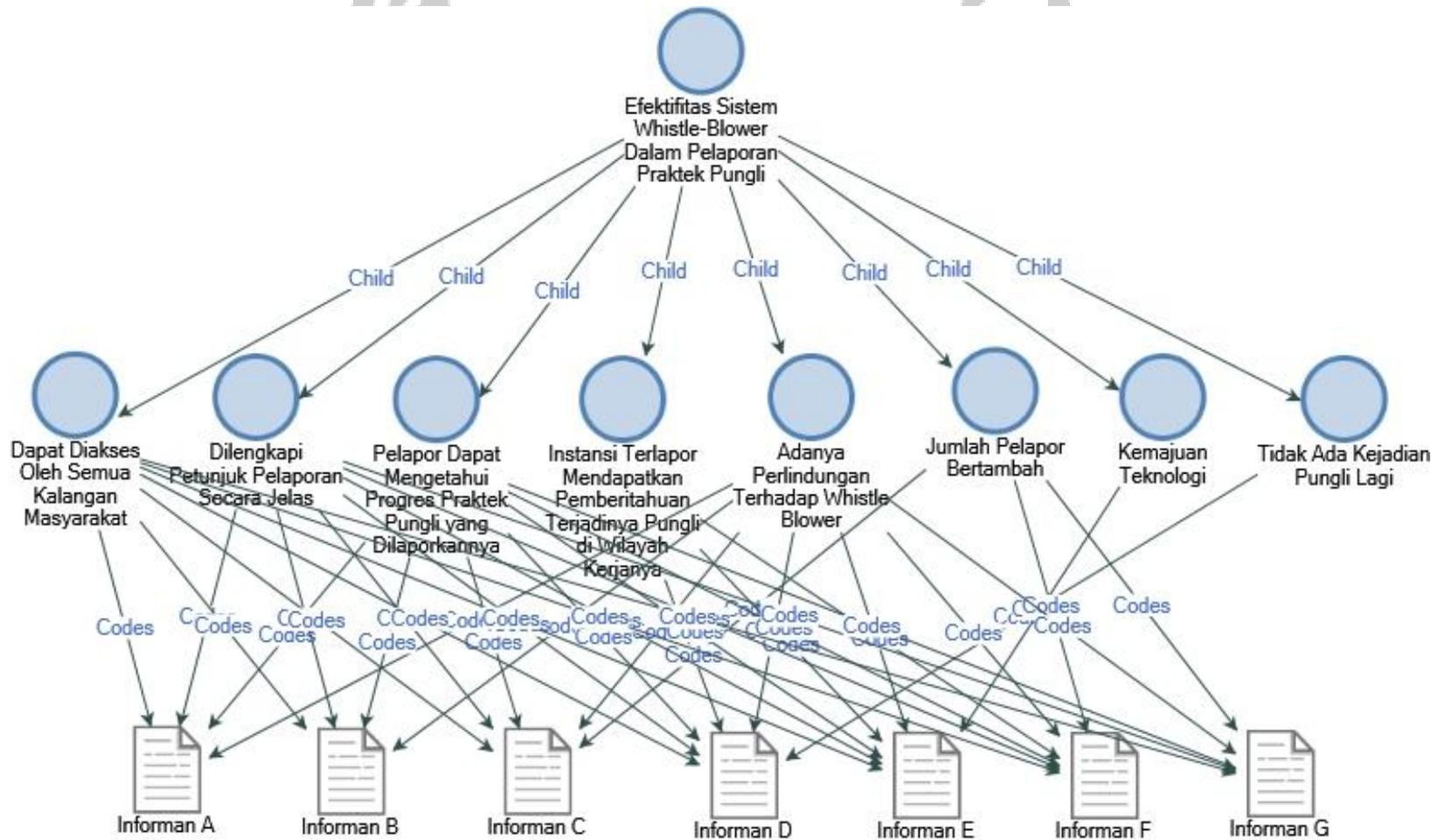
Lampiran 5

Model Penelitian Lapangan – Pengaruh Dibentuknya Satgas Saber Pungli



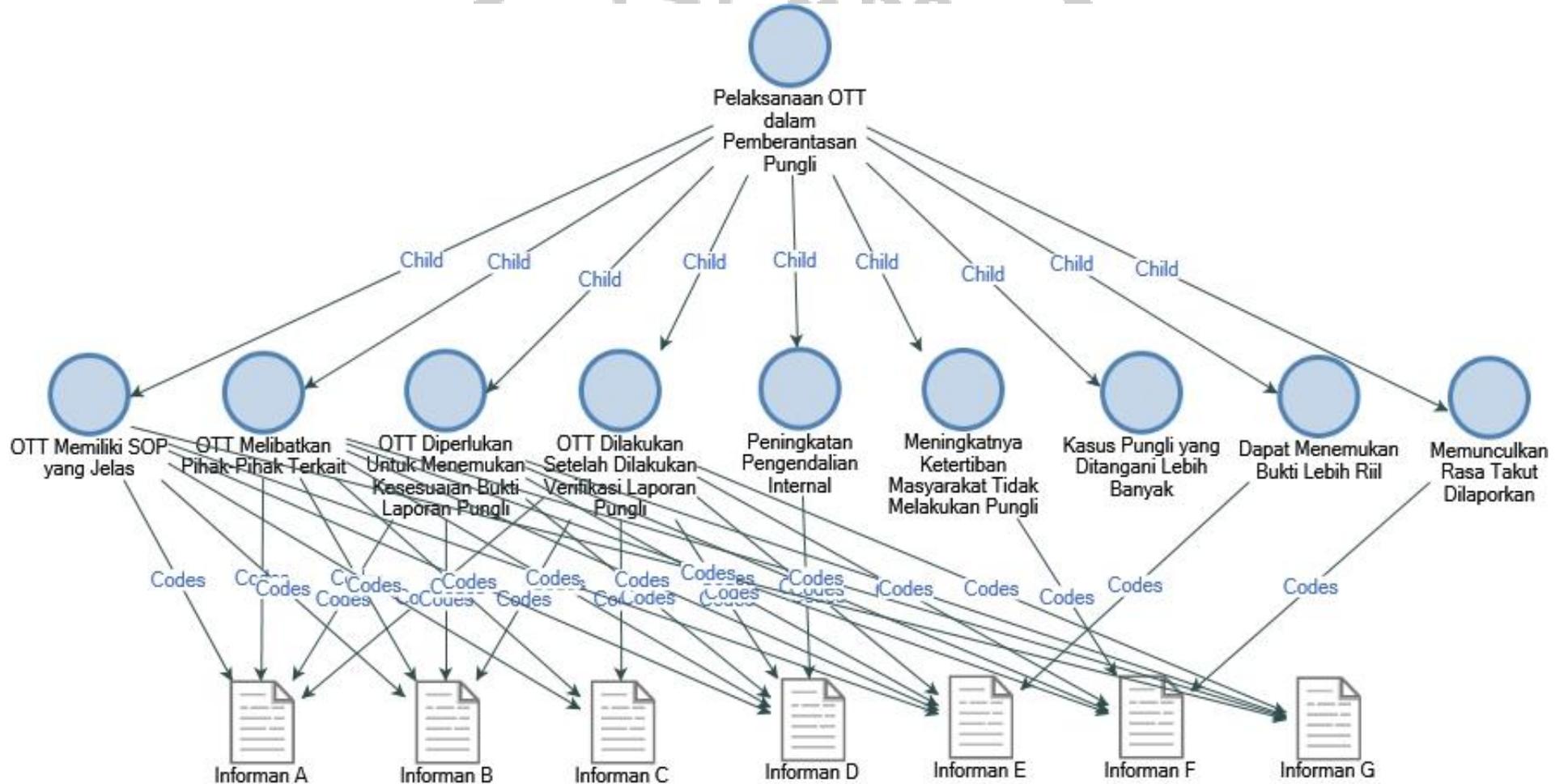
Lampiran 6

Model Penelitian Lapangan – Sistem *Whistle-Blowing* Dalam Pelaporan Pungli



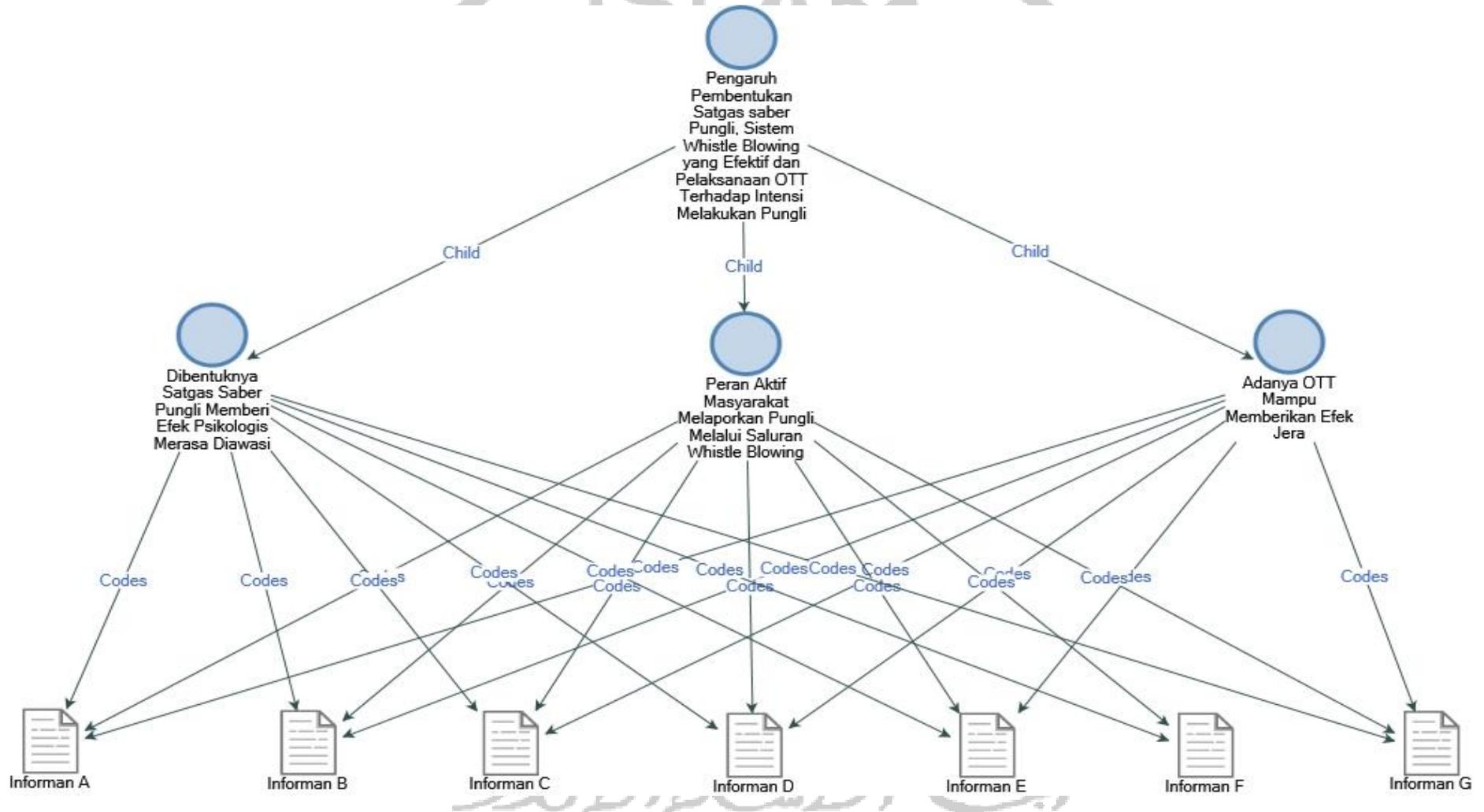
Lampiran 7

Model Penelitian Lapangan – Pelaksanaan OTT dalam Pemberantasan Pungli

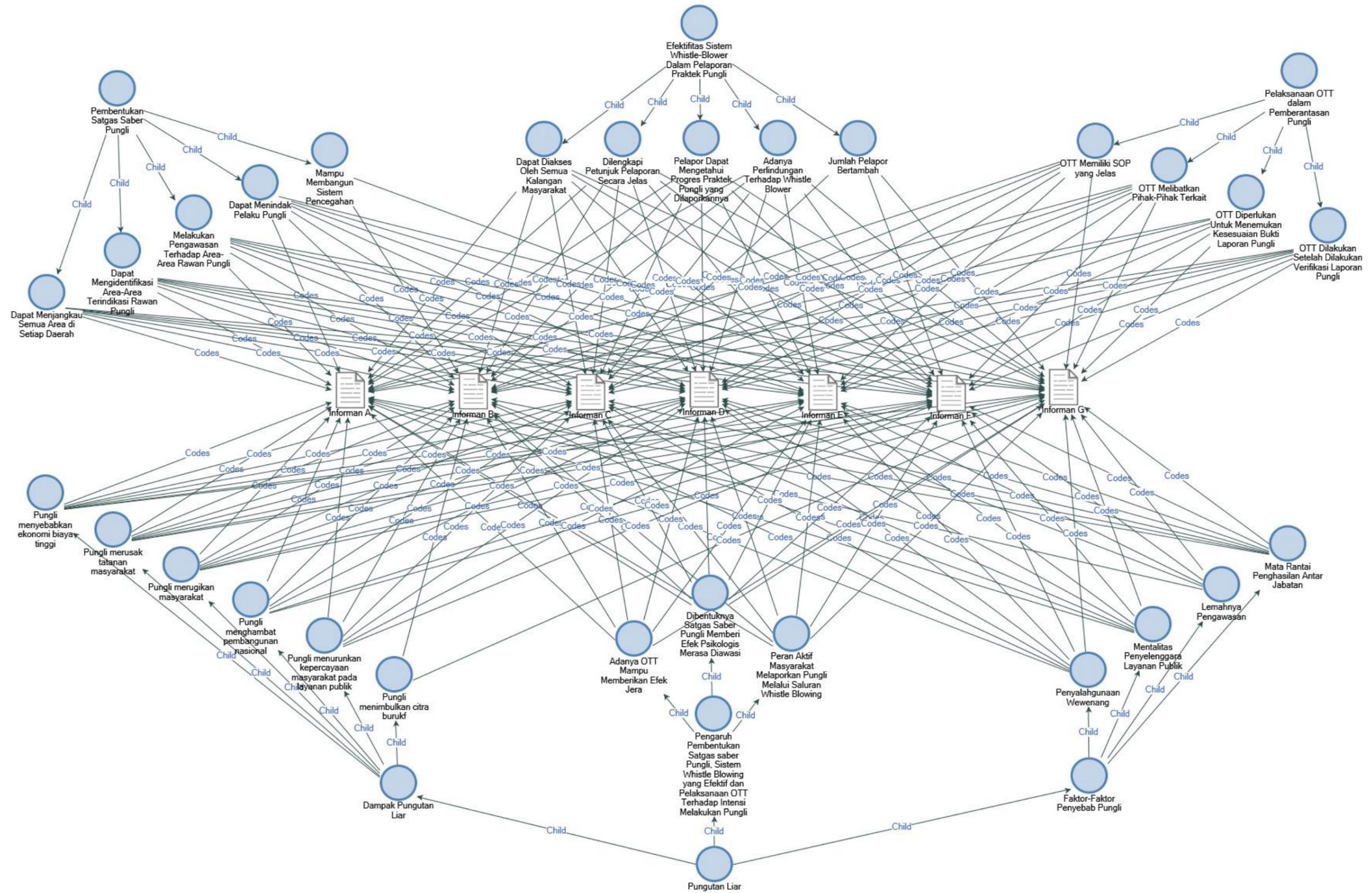


Lampiran 8

Model Penelitian Lapangan – Intensi Melakukan Pungli



Lampiran 9 Model Penelitian Komprehensif



Lampiran 10

TABEL REKAPITULASI HASIL WAWANCARA INFORMAN

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
Dampak Pungutan Liar	P.1.1.1	Apakah pungli dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Seperti misalnya tarifnya 10 ribu Karena ada pungli maka menjadi 12 ribu secara otomatis bagi orang pengusaha akan masuk di cost, otomatis kalo costnya tinggi maka biaya yang dikeluarkan juga bertambah
			B	POLDA DIY	Ya	
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	Contoh kongkritnya tapi ini kami belum bisa menangkap basah, karena pungli itu susah sekali dibuktikan, karena pungli itu tidak bisa sendiri, pasti bareng-bareng . Katakanlah pungli perjinan, otomatis biaya pungli itu akan menambah biaya operasional mereka (pemohon ijin). Kalau mereka membuat produk otomatis akan menjadi beban pada produk itu. Karna untuk menentukan harga biaya pasti dihitung dan pungli masuk sebagai biaya juga akhirnya
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Mungkin bisa, Karena yang seharusnya tidak ada anggaran yang dikeluarkan untuk itu menjadi ada. Namun be beberapa pihak ada yang merasa diuntungkan misal yang penting cepet jadi atau selesai, seharusnya SOPnya harus antri namun dengan pungli proses didahulukan walopun hal tersebut melanggar aturan
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Karena masyarakat akhirnya harus menyediakan budget lebih untuk mendapatkan layanan.
			A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	
			C	Inspektorat DIY	Ya	
P.1.1.2		Apakah pungli dapat menimbulkan kerusakan pada tatanan masyarakat?	D	Inspektorat Bantul	Ya	Contoh paling gampang, pungli yang ada di wilayah pariwisata parkir contohnya, parkir kalau sudah resmi kan kontrolnya gampang tapi akan menjadi sulit kalau parkir itu parkir liar. Tarifnya lebih mahal pelayanan kurang bagus

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
	P.1.1.3	Apakah masyarakat dirugikan dengan adanya pungli?	E	Kejari Kota Jogja	Ya	Tatanan masyarakat kan diatur supaya semua bisa berjalan dengan baik sesuai rules-nya. Nah pungli tersebut kan tidak ada payung hukumnya, tidak jelas, diluar rules makanya dapat merusak tatanan masyarakat. Yang seharusnya ada biaya yang tidak perlu menjadi ada
			F	Kejati DIY	Ya	Jelas karena dia mempengaruhi sistem
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan kesenjangan dalam tatanan masyarakat
			A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	ya	Banyak masyarakat secara umum belum menyadari kalau pungli itu merugikan, tapi bagi yang menyadari itu merugikan. Seperti kata orang jawa pungli itu seperti “Tumbu entuk tutup” maka pungli itu tidak mudah terjadi bila salah satu tidak mau, yang melakukan nggak mau maka yang ngasih juga tidak bisa. Pungli itu kan superior, superiornya kan pemerintah dan inferiornya atau calon korbannya bisa masyarakat, pengusaha dan investor. Dalam berpraktek, secara simpel kami selalu sampaikan ke masyarakat, Bapak-Ibu jangan menuntut pungli itu hilang kalau bapak-ibu masih sering menghidupkan suasana pungli. Seperti contoh, sudah ditulis pelayanan gratis, tapi orang jawa selalu nggak enakan, kemudian menanyakan biayanya berapa lha itu sama saja menghidupkan pungli di wilayah itu. Yang inverior mau memberi, si pemerintah sebagai superior tidak menolak dan menjelaskan bahwa ini gratis tapi malah bilang “monggo seiklasnya”. Secara umum di Bantul pungli sudah jarang terutama di lingkungan layanan publik
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota	Ya	

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
				Jogja		
	P.1.1.4	Apakah pungli dapat menghambat jalannya pembangunan nasional?	A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Tidak	Dalam jangka panjang iya bila terjadi di salah satu sektor. Kalau jangka pendek saya rasa tidak. Apalagi di era Pak Jokowi ini semua urutan birokrasi yang panjang dipangkas maka segala pengurusan sekarang ini sudah cepat
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.1.1.5	Apakah pungli menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat pada layanan publik yang diberikan oleh pemerintah?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Walaupun pelakunya oknum tapi yang kena pasti institusinya
			B	POLDA DIY	ya	Pungli sasaranya bukan hanya pemerintah dalam pelayanan public tapi juga termasuk masyarakat. Contoh : Orang mengambil pasir di tempat tempat tertentu mereka tidak membayar retribusi hal tersebut juga termasuk pungli. Contoh kedua, oknum tukang parkir harusnya menarik 2 ribu tapi narik 5 ribu atau malah 10 ribu itu juga pungli
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Kalau oknum tersebut tidak ditindak tidak diketahui oleh instansi yang bersangkutan pasti akan menurunkan citra lembaga itu sendiri. Makanya institusi secara internal juga harus konsisten memberantas pungli tadi
			F	Kejati DIY		
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Apalagi kalau salah satu oknum ada yang terkena OTT imbasnya tidak hanya pada pelaku namun juga citra instansi akan menjadi buruk di mata masyarakat. Bahkan tanpa kena OTTpun juga citra buruk itu dapat tersematkan oleh getok

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					tular dari masyarakat yang pernah terkena pungli	
	P.1.1.6	Dampak Tambahan Menurut Narasumbet	A	Inspektorat Sleman	Tidak Ada	
			B	POLDA DIY	Ada	Ketidakjelasan di dalam pelayanan publik, adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada sector-sektor yang membutuhkan pelayanan. Contoh di Jogja ini daerah wisata, parkir adalah pelayanan public misal perdanya hanya menarik 5 ribu tapi kenyataannya menarik 20 ribu, maka dampaknya akan kemana-mana untuk sektor pariwisata dampaknya akan ke pemerintah daerah. Yang terjadi adalah image negative bahwa parkir malah
			C	Inspektorat DIY	Ada	Ada dampak lainya selain ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan yang paling tampak adalah tatanan sosial, kalau kita tidak serius menangani itu maka larinya ke Budaya. Yang akhirnya nanti sedikit-sedikit dengan tambahan uang sekian urusan jadi lancar. Dampak di sosial budayanya luar biasa
			D	Inspektorat Bantul	Ada	Trust dari stakeholder akan kurang. Lembaga tersebut walaupun benar stakeholders tidak akan percaya
			E	Kejari Kota Jogja	Tidak Ada	
			F	Kejati DIY	Aad	Mempengaruhi pada kepercayaan investor dari segi hukum adanya pungli juga bisa berdampak jadi terkesan tatanan masyarakat dalam pelayanan ekonomi tidak tertip, tidak taat dengan peraturan yang sudah ada contoh parkir harga 3 ribu kok tau-tau ada inisiatif dinaikkan
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ada	Menyebabkan citra buruk tidak hanya organisasi pelayanan publik tapi bila masih terjadi secara masif di suatu daerah dapat menurunkan citra buruk daerah itu sendiri.
Faktor Penyebab Pungli	P.1.2.1	Apakah potensi dan daya tarik suatu daerah dapat memicu timbulnya pungli?	A	Inspektorat Sleman	Tidak	Sebenarnya lebih dipengaruhi juga oleh mentalitas. Tidak hanya mental dari ASN tapi juga mental dari masyarakat. Misal sebenarnya ASN tidak menginginkan tapi pihak masyarakat/investor mengiming-imingi biar prosesnya lebih

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					cepat	
			B	POLDA DIY	Ya	Pada tempat dan waktu tertentu. Misal; musim liburan, kalau tidak musim liburan tukang parkir akan menarik pada tarif normal. Contoh lain ; Saat penerimaan siswa, sekarang sudah ada Permendikbud Th 2017 disitu yang boleh sebagai komite untuk melakukan penarikan terhadap siswa ditentukan oleh menteri pendidikan, sehingga dalam penerimaan siswa sekolah dilarang menarik iuran selain dari yang telah ditentukan dalam Permendikbud. Laporan terkait sekolah itu biasanya di saat ujian atau pada saat mau masuk Kalau terkait Polisi ya pelayanan publik di suatu tempat, contohnya SIM setiap masyarakat boleh melaporkan
			C	Inspektorat DIY	Tidak	
			D	Inspektorat Bantul	Tidak	Pungli itu lebih kepada moralitas dan akhlak
			E	Kejari Kota Jogja	ya	Sangat bisa karena pertumbuhan ekonomi yang bagus kan memicu lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan sangat terbuka dan persaingan juga semakin ketat kemudian beberapa oknum berkreasi, wah ini kok ada peluang. Jika peluang-peluang ini tidak discover dengan jelas maka oknum-oknum ini akan masuk ke situ untuk membuat aturan sendiri dan mengadakan pungutan. Maka pemerintah harus jeli membaca itu. Ada potensi-potensi tersebut harus discover dengan aturan Pemda yang jelas
			F	Kejati DIY	Ya	Misalnya suatu daerah yang dikatakan daerah pariwisata maka cenderung banyak obyek wisata di sektor-sektor tersebut berarti banyak layanan publik disitulah dapat muncul pungli dengan sendirinya
			G	Inspektorat Kota Jogja	Tidak	Saya rasa kalau di jogja sekarang ini tidak ya mas. Seperti contohnya di DPMPT kota. Hampir semua layanan sudah mulai menggunakan aplikasi sehingga dapat mengurangi interaksi langsung antara yang melayani dan dilayani
	P.1.2.2	Apakah pungli terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang?	A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	Contoh, buat SIM biayanya 100 ribu menjadi 150 ribu. Tidak hanya di Kepolisian, di Pertanahan, bahkan sekolah

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					sekalipun. Jadi mengambil diluar ketentuan. Kalau perdanya 10 ribu dia ngambil 15 ribu	
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	kalau tida punya wewenang tidak bisa pungli
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Untuk ASN masih, untuk masyarakat sipil biasa tidak harus punya kewenangan. Misal : Tukang parkir yang punya wewenang malah tidak markiri tapi dilimpahkan ke orang lain. Na orang lain yang tidak memiliki wewenang tersebut malah jadi melakukan pungutan liar. Kembali lagi tadi soal urusan ekonomi
			F	Kejati DIY	Ya	Bisa masuk di peluang, peluang itulah yang dia salah gunakan dengan jabatan yang dia punya
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.1.2.3	Apakah ketidak seimbangan penghasilan yang diterima dengan jabatan yang diemban dapat menimbulkan pungli?	A	Inspektorat Sleman	Tidak	Sebetulnya ASN saat ini menurut saya sudah cukup untuk hidup layak, tapi bukan mewah ya, tapi karena orang kadang punya keinginan yang lebih dari penghasilannya. Misal sudah punya mobil yang mana secara fungsi mencukupi untuk transportasi, namun di masyarakat kepingin terlihat prestis jadi kepingin mobil yang lebih bagus lagi yang mana dapat mendorong dia untuk bagaimana caranya mendapatkan penghasilan lebih.
			B	POLDA DIY	Tidak	Namun hal ini lebih berkaitan dengan mentalitas, pungli itu sama dengan tindak pidana korupsi. Mau punya gaji berapapun kalo melihat ada peluang pungli da masih melakukan berarti kan mentalnya.
			C	Inspektorat DIY	Tidak	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Tidak	Hal tersebut kembali ke individu masing-masing. Kalau tidak ada niatan melakukan pungli maka juga tidak terjadi, jadi kembali ke pribadi masing-masing
			F	Kejati DIY	Ya	Karena ini ketidakseimbangan. Misal penghasilannya rendah sementara beban biaya yang harus dia tanggung

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Tidak Saya rasa tdk. Untuk saat ini take home pay dari seorang ASN sudah cukup untuk hidup layak. Kalau masih bilang tidak mencukupi itu biasanya tergantung gaya hidupnya	
	P.1.2.4	Apakah mentalitas dari penyelenggara layanan public dapat menjadi penyebab melakukan pungli?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Akar permasalahannya adalah dari mental. Sebenarnya pemerintah sudah membuat berbagai atauran untuk supaya tidak ada pungli, tapi tetap saja ada pihak-pihak yang mencari celah untuk itu. Tidak hanya ASN tapi juga masyarakatnya, misal pengurusan ijin, sudah ada aturannya, sudah ada SOP kemudian pinginya cepet jadi bagaimana caranya supaya cepat kemudian dia mengasih amplop
			B	POLDA DIY	Ya	
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Makanya dari internal institusi harus kuat maka benar-benar punya komitmen yang tinggi. Itu dari Pimpinannya yang mendorong para pegawai dalam melayani masyarakat harus punya integritas terutama dalam turut memberantas pungutan liar
			F	Kejati DIY	Ya	Itu yang utama. Kalau berbicara faktor penyebab semua berawal dari mental manusianya
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Bukan saya mendukung si A si B ya. Namun revolusi mental itu juga sangat diperlukan dalam rangka pencegahan pungli ini.
	P.1.2.5	Apakah budaya organisasi yang telah terbentuk secara terus menerus di suatu lembaga dapat menyebabkan pungli dianggap sebagai hal biasa?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Karena kebiasaan maka dianggap sebagai sebuah nilai di organisasi
			B	POLDA DIY	Tidak	Perlu dilakukan penanganan karena hal tersebut oknum bukan budaya. Oknum yang menyalahgunakan pada sebuah organisasi. Karena Budaya Organisasi adalah hal yang baik. Oknum tadi kalua sebagai pegawai negeri atau polisi. Jadi pungli tidak hanya dilakukan pegawai negeri dan polisi tetapi masyarakat biasapun juga bisa melakukan pungli.

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
					Sebagai contoh biaya tinggi pada saat membangun beli pasir dan ada oknum-oknum di jalan yang memiliki kepentingan pribadi sehingga dia narik pungli. Atau di tempat wisata yang harusnya mampu meningkatkan kegiatan masyarakat tapi karena perilaku masyarakat harusnya parkir 5 ribu dia ngambil 20 ribu
			C Inspektorat DIY	Tidak	Saya rasa tidak ada budaya organisasi yang jelek
			D Inspektorat Bantul	Tidak	Biasanya budaya organisasi itu hal yang positif. Kita melihat dari sisi seberangnya, bila pengendalian tidak kuat maka pungli mudah tumbuh, makanya yang kita perkuat adalah budaya kerja yang positif. Budaya kerja di Pemda itu namanya Budaya Satriya. Terlebih di Inspektorat ini sangat keras, baru ada dugaan pungli saja langsung diproses
			E Kejari Kota Jogja	Ya	Budaya kan bisa positif maupun negatif. Kalau hal yang tidak baik tersebut tidak dibenahi atau dikendalikan tetap akan memicu tindakan pungli. Dengan dibentuknya saber pungli ini dengan sosialisasi hingga tingkat desa secara terus menerus maka diharapkan lambat laun budaya yang tidak baik tersebut akan hilang apalagi ada Satgasya yang mengawasi itu
			F Kejati DIY	ya	Kalau budaya organisasi kan biasanya suatu sistem yang perlu dijunjung tinggi kalau ini yang positif maka tidak, kalau budaya yang negatif maka ya bisa menjadi penyebab karena kebudayaan itu sama dengan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang
			G Inspektorat Kota Jogja	Tidak	Budaya organisasi itu kan hal yang baik yang telah dibangun berdasarkan nilai-nilai seperti integritas, kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya.
	P.1.2.6	Apakah lemahnya pengawasan dari atasan dan atau badan pengawas dapat memicu adanya pungli?	A Inspektorat Sleman	Ya	
			B POLDA DIY	Tidak	Pengawasan perlu dioptimalkan, saya tidak bisa mengatakan bahwa lemah tapi perlu dioptimalkan. Hal ini karena pengawasan sudah dilakukan, sudah maksimal tapi kurang optimal dan sudah melakukan pencerahan. Tahun 2019 seluruh polres bebas korupsi dan akan dinilai oleh Permenpan RB termasuk pelayanan publik. Kepolisian akan

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
					mengurangi area-area yang rawan korupsi dan pungli
			C Inspektorat DIY	Tidak	Pengawasan yang kami lakukan ini pengawasan yang memiliki keterbatasan oleh karena itu kembali ke integritas diri masing-masing saja
			D Inspektorat Bantul	Ya	Pengawasan makro di inspektorat, tapi paling efektif adalah pengendalian internal. Inspektorat tidak mengawasi sendiri tapi mendorong agar sistem pengawasan internal di OPD dapat berjalan
			E Kejari Kota Jogja	Ya	Setiap hari kan pimpinan instansi bisa melakukan waskat (pengawasan melekat) ketika mulai terjadi kasus pungli maka pengawasan diperketat apabila tidak terdapat kasus maka pengawasannya biasa-biasa saja. Kalau dari awal itu pengawasannya bagus maka potensi-potensi terjadinya pungli tidak akan terjadi
			F Kejati DIY	Ya	Termasuk juga control masyarakat, kontrol masyarakat juga perlu, karena pungli ini tidak hanya terjadi di kelembagaan, di instansi-instansi tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Karena mata rantai pungli ini dari manusia lahir sampai manusia meninggal bisa terjadi
			G Inspektorat Kota Jogja	Ya	Karena ini semua juga tergantung instansinya. Kalau kami dari inspektorat dan Satgas Saber Pungli hanya mendorong agar pengendalian internal di tiap instansi dapat berjalan dengan baik. Faktor leadership di suatu instansi juga berpengaruh dalam hal ini. Kalau pimpinannya tegas mungkin pengawasan baik.
	P.1.2.7	Apakah adanya mata rantai penghasilan antar jabatan dapat menyebabkan pungli terus terjadi?	A Inspektorat Sleman	Ya	
			B POLDA DIY	Ya	
			C Inspektorat DIY	Ya	
			D Inspektorat Bantul	Ya	Tapi kalau hal ini terjadi saat ini maka langsung ditindak, minimal mutasi ke tempat yang jauh. Karena di wilayah pemda sini Zero Tolerance terhadap yang namanya pungli
			E Kejari Kota Jogja	Ya	memang ada kalanya seperti itu. Misalnya pelakunya adalah oknum bawah dan dia punya atasan dan yang punya

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					wewenang itu atasannya dan atasannya mau menerima jadinya bisa saja rantai jabatan itu menyebabkan pungutan liar	
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.1.2.7	Faktor Penyebab Pungli yang lain menurut narasumber	A	Inspektorat Sleman	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya celah-celah di dalam aturan sehingga dengan mentalitas yang kurang baik bisa menjadikan pungli tetap ada, jadi gimana caranya aturan yang ada itu harus terdapat pengendalian yang baik - Komitmen pimpinan terkait praktek bersih dan pengawasan intern yang masih lemah
			B	POLDA DIY	Ada	Budaya yang salah terhadap hedonisme. Tauladan dari serang pimpinan itu perlu, pola hidup harus sederhana
			C	Inspektorat DIY	Ada	Yang namanya birokrasi itu selalu ditekankan untuk memiliki mentalitas yang baik. Tetapi jangan salah juga ketika pelayan-pelayan public yang saat itu didesak atau diming-imingi oleh sesuatu yang lebih besar, dirayu ya akhirnya timbulah pungli tersebut. Jadi factor eksternal juga berpengaruh
			D	Inspektorat Bantul	Ada	Mentalitas, sifat serakah, bukan lagi factor ekonomi karena secara gaji dan tunjangan sudah sangat mencukupi
			E	Kejari Kota Jogja	Ada	Adanya celah-celah yang belum ada peraturannya. Misal kegiatan yang melibatkan kepentingan masyarakat misal ada hak dan kewajiban misal tidak discover oleh aturan yang jelas maka ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan peluang itu kedian melakukan penarikan-penarikan yang tidak ada aturannya supaya masyarakat tidak dirugikan
			F	Kejati DIY	Ada	Belum adanya aturan tentang suatu kegiatan pelayanan publik. Contoh kenapa parkir di jalan umum daripada parkir dilahan pribadi lebih mahal semau-maunya kalau mau 20 ribu kalau tidak silahkan cari tempat lain. Na hal ini yang harus ada aturannya dan ada sanksinya. Misal sanksinya

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					dalam bentuk denda. Karena dalam perbuatan pungli ini bisa kejahatan bisa pelanggaran misal melanggar Perda tentang parkir kalau kejahatannya yang ada unsur kekerasan atau pemerasannya pasal 368 KUHP Ancamannya. Dia harus bayar sekian kalau tidak tak biegin-biegin, ada unsure ancamannya maka diancam pidana 10 tahun. Jad pungli bisa pelanggaran bisa kejahatan	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Tidak	
Pembentukan Satgas Saber Pungli	P.2.1.1	Apakah Satgas Saber Pungli dapat menjangkau semua area di setiap daerah di Indonesia?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Sebenarnya setiap pemda wajib membentuk Tim Saber Pungli, namun untuk di wilayah kami terdapat keterbatasan waktu dan tenaga sehingga apa yang dilakukan oleh Tim lebih mengedepankan preventif, lebih banyak pada sosialisasi pemahaman baik kepada masyarakat maupun ASN, karena keterbatasan waktu dan tenaga jadi belum dapat menjangkau seluruh masyarakat, selain mengadakan acara tatap muka langsung juga melalui semacam videotron, selebaran dll. Tim Saber pungli hanya sampai kabupaten yang terdiri dari 3 institusi; kepolisian, kejaksaan dan pemda.
			B	POLDA DIY	Ya	Di jogja sudah sampai level kabupaten kota dan untuk sosialisasinya sudah menyentuh sampai tingkat desa. Semua kepala dinas vertikal horizontal kita sudah kena sosialisasi, sekolah juga sudah. Alhamdulillah Khusus untuk jogja potensi kasus pungli tidak semarak. Kalau kepolisian sudah punya organ hingga tingkat desa namanya Babin Kamtibmas. Dari situ menjangkau bahwa pungli sebagai aktivitas yang tidak diperbolehkan termasuk kepada Kepala Sekolah
			C	Inspektorat DIY	Ya	Seharusnya iya, karena strukturnya itu mulai dari tingkat propinsi hingga Kabupaten-Kota. Dan kebawahnya unsur-unsur wilayah terkecilpun masuk dalam bagian dari Satgas itu. Kalau di tingkat kabupaten kota ketua Satgasnya adalah Wakapolres atau Wakapoltabes. Artinya dalam strukturnya kabupaten itu dia ada keterwakilan dari unsur OPD induk sampai dengan Kepala Wilayah-wilayah terkecil. Mungkin ini jarang diekspos bahwa sebenarnya Camat dan Kedes

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
					masuk sebagai unsur Satgas Saber pungli
			D Inspektorat Bantul	Ya	Sesuai dengan kewenangan dari masing-masing unit kerja
			E Kejari Kota Jogja	Ya	Kalau sudah dibentuk ya pasti bisa menjangkau. Ada di setiap propinsi dan kabupaten-kota. Untuk menjangkau sampai dengan tingkat pada suatu waktu mengadakan kegiatan pertemuan, sosialisasi dan mengundang aparatur aparatur pemerintahan tingkat kodya untuk sosialisasi ke semua kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa ke warga desanya
			F Kejati DIY	Ya	karena Satgas Saber Pungli ini ada di seluruh Indonesia dan terbentuk di satker satker yang ada baik satker vertical maupun satker daerah. Kalau vertical seperti kejaksanaan pimpinannya Jaksa Agung, kalau harisontal Pemda baik tingkat kabupaten atau kotamadya .
			G Inspektorat Kota Jogja	Ya	Satgas Saber Pungli di daerah ada di tingkat propinsi dan kabupaten-kota. Untuk menjangkau hingga kecamatan dan kelurahan kami aktif melakukan sosialisasi baik dalam bentuk tatap muka maupun melalui spanduk, banner yang mensosialisasikan chanel untuk melaporkan kejadian pungli oleh masyarakat
	P.2.1.2	Apakah Satgas Saber Pungli dapat mengidentifikasi area-area terindikasi rawan pungli?	A Inspektorat Sleman	Ya	Kalau tugas Inspektorat selaku pengawas maka sejauh masih dalam wewenang kabupaten maka sesuai dengan tupoksi maka inspektorat bisa mengetahui area-area mana saja yang berpotensi pungli, maka kemudian sebagai tindakan preventif, maka sosialisasinya dilakukan di area-area yang rawan pungli tersebut baik kepada masyarakat maupun kepada ASN. Jadi model sosialisasi kami, misal kaitannya dengan pengadaan; penyedia jasa diundang dan instansi yang menggunakan penyedia jasa juga diundang sehingga keduanya mendengar langsung
			B POLDA DIY	Ya	
			C Inspektorat DIY	Ya	
			D Inspektorat Bantul	Ya	Ada 8 area rawan pungli : 1. Planning budgeting – pungli di fase perencanaan paling

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					<p>gampang “Besok kamu tak masukkan tak kasih kerjaan tapi buat aku sikian ya”</p> <p>2. Manajemen pegawai – pindah, mutasi, promosi</p> <p>3. Pengadaan barang dan jasa - kalau tidak dikasih uang tidak diproses, kalo tidak dikasih uang tidak diproses SPKnya</p> <p>4. Perijinan – kalau tidak dikasih uang tidak diproses perijinannya</p> <p>5. Kalau di desa masalah pertanahan</p> <p>6. Retribusi</p> <p>Sudah ada peta rawan pungli</p>	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Punya beberapa media informasi. Ada yang dari media sosial ada yang turun ke lapangan atau berdasarkan laporan yang diterima maka dapat dentifikasi pungli tersebut apa sektor apa saja dan dimana
			F	Kejati DIY	Ya	karean kami dari awal terbentuk telah membuat mapping area apa saja yang rawan pungli
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Tertera dalam Surat Edaran Gubernur DIY nomor 14 tahun 2016 tentang Saber Pungli
	P.2.1.3	Apakah Satgas Saber Pungli melakukan pengawasan terhadap area-area yang terindikasi rawan pungli?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Sesuai tupoksi kami
			B	POLDA DIY	ya	Dengan melakukan koordinasi dengan berbagai unsur, unsur Forkompinda, sesetiap daerah organisasi vertical dan horizontal dibentuk anti pungli
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Waktunya tidak kontinyu karena setiap unit kerja memiliki tupoksi sendiri2 namun tetap dipantau. Atau melibatkan aparat pemerintah di area yang rawan pungli tersebut. Kemudian disoundingkan bila terjadi pungli maka langsung kontak Satgasnya

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
			F	Kejati DIY	Ya	Satgas saber pungli ada di setiap daerah masing-masing punya unit satker atau UPP yang melakukan pengawasan terhadap area-area rawan pungli
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.2.1.4	Apakah Satgas Saber Pungli dapat menindak pelaku praktek pungli?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Selama ini kami ada tim dimana Tim itu kalau menindak sesuai kewenangan masing-masing, kalau yang bisa menindakkan kepolisian, masing-masing wilayah ada pokja-pojkanya kan. Kemudian kalau terjadi penyimpangan maka akan ada pengaduan. Pengaduan akan kita kaji ini termasuk kewenangan siapa, maka setelah itu disampaikan instansi masing-masing. Jika ada penyimpangan maka kita akan melakukan pemeriksaan sesuai tugas pokok fungsi itu. Kalau arahnya ke tindak pidana maka diserahkan ke APH. Jadi dikembalikan ke tupoksi masing-masing
			B	POLDA DIY	Ya	Kita juga menindak disamping sosialisasi
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	
			F	Kejati DIY	Ya	karena sesuai dengan bunyi Peraturan Presiden no 87 tahun 2016 disitu disebutkan dan telah diatur tugas, fungsi dan kewenangan pasa 2,3 dan 4. Di pasal 2 kita melakukan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan satuan kerja dan sarana prasarana
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Kareana salah satu fungsi yang tertera dalam peraturan presiden tentang saber pungli adanya fungsi penindakan
	P.2.1.5	Indikator lain keefektifan pembentukan Sattgas Saber Pungli menurut narasumber	A	Inspektorat Sleman	Ada	Selama ini terus terang satgas saber pungli adalah satgas yang melibatkan beberapa instansi dan tiap instansi kan juga punya tupoksi yang tidak menyimpang dari Satgas Saber Pungli ini, kareana kesibukan masing-masing maka koordinasinya belum efektf berjalan, namun masing-masing instansi juga sudah melaksanakan tupoksinya, sebenarnya seperti itu

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
			B	POLDA DIY	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - OTT kita melaksanakan kasus 33 jumlah pelaku hingga saat ini 57, Di kemenkumham imigrasi pernah OTT 1, pemkot jogja ada 2 pelaku 2, dispenda juru parkir, jumlah kasus 16 - Lebih banyak melakukan pencegahan/preventif supaya tidak melakukan pungutan liar
			C	Inspektorat DIY	Ada	Kami ini kan berjenjang satgasnya, jadi factor suksesnya adalah koordinasi yang intens. Di luar jawa sana ada yang komunikasinya stagnan. Artinya contoh ketika ada OTT di Pemda,tidak ada komunikasi dengan Inspektorat Artinya APH itu dapat melakukan penegakan hukum pada siapa saja
			D	Inspektorat Bantul	Ada	kalau dulu pikiran kita kalau nangkep itu menjadi indicator, sekarang dibalik kalau tidak ada yang ditangkep ya itu indikatornya.Kalau dulu absolute, angkanya besar bagus, kalau sekarang in heart angkanya semakin kecil semakin bagus
			E	Kejari Kota Jogja	Ada	Simpelnya kalau tidak ada laporan ke Satgas baik secara langsung atau melalui aparat di bawahnya maka pembentukan satgas tersebut telah efektif
			F	Kejati DIY	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Kita bicara di DIY sejak terbentuknya Saber Pungli kecenderungan kesadaran masyarakat dalam memberikan layanan publik lebih tertib. Misal parkir yang dulunya tidak dikasih tiket sekarang dikasih tiket termasuk yang di lahan pribadi juga sudah dikasih tiket. Untuk parkir lahan pribadi biasanya sudah kesepakatan dengan aparat desa - Keefektifan yang berkaitan dengan pelaku tindakan pungli, ada hasil yang dilakukan dari operasi penangkapan, nanti data bisa dilihat di Polda. Karena tidak semua data pelaporan atau penyelidikan yang baik dari Kepolisian semua diproses di putusan 3, karena seperti yang saya katakana tadi penanganan pelanggarannya melalui penyidik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang dilakukan Satpol PP terhadap Perda. Disitu hukumannya cuman Denda. Langsung diproses dan disidangkan jad mereka itu

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					<p>boleh menindak sesuai peraturan, boleh menuntut untuk diajukan ke pengadilan dan akan dikenakan denda. Misal contohnya punglinya terkait sertifikat tanah kalau tidak membayar tidak dikeluarkan maka sudah menjad kewenangan penyidik kepolisian karena sudah termasuk kejahatan karena ada unsur pemaksaan. Apabila disitu pelaku pungli menyalahgunakan kewenangnya berarti ini kental ke tipikor, berarti nanti berkoordinasi dengan Reskrimsus. Masuk tindak pidana khusus. Supaya dalam tahap berikutnya penuntutan ini masuk tindak pidana khusus atau tindak pidana umum. Pungli masuk tindak pidana umum tapi kalau merembet bisa masuk tindak pidana korupsi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem pencegahan, setiap kita mengadakan sosialisasi ke masyarakat responnya selalu baik dan positif sekali 	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ada	Semakin sedikit ditemukan atau dilaporkannya kasus pungli di lingkungan pemda berarti langkah-langkah satgas dalam melakukan pencegahan efektif
Sistem <i>Whistle Blowing</i> yang efektif	P.3.1.1	Apakah sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan Saber Pungli dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Di sleman sebelum ada saber pungli sudah ada saluran-saluran untuk mengadukan adanya penyimpangan melalui Lapor Sleman, Bupati dapat menerima langsung laporan dan inspektorat juga begitu. Bila ada laporan masuk ke kami kemudian kami kaji, bila terdapat indikasi penyimpangan maka diadakan pemeriksaan apabila itu menyangkut ASN di lingkup Kabupaten Sleman, kadang masyarakat ada yang kurang paham, karena domisili di slemana maka lapor ke Sleman. Misal pengaduan terkait pungli SMA, hal itu merupakan wewenang propinsi, sehingga pengaduannya kami sampaikan ke Propinsi. Demikian pula bila pengaduan ke propinsi namun sebenarnya kewenangan kabupaten maka disampaikan ke kabupaten dan akan kita tindaklanjuti. <i>Whistle blowing</i> sistem sebenarnya adalah pengaduan internal. Jadi pengaduan oleh ASN. Di Sleman sudah ada peraturan Bupatiya sudah disosialisasikan dan bila ada pengaduan bisa melau website inspektorat. Sosialisasi ke

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					OPD tapi belum ada yang mengadu. Apakah mereka takut ataukah sudah baik. Sudah 2 tahun tidak ada yg mengadu	
			B	POLDA DIY	Ya	Kontak personya kita semuanya, terbuka untuk umum siapa saja boleh Kabupaten kota sendiri juga ada
			C	Inspektorat DIY	Ya	Karena kita masuk ke semua lini akses media, baik TV, Radio, Internet, Surat Kabar, Telepon, Kotak Pos sampai aduan manual datang ke Inspektorat.
			D	Inspektorat Bantul	Ya	Cukup masuk web pemda ada saluran terkait whistle blower. Tapi masih ada kelemahannya, orang kalau mau nglapor masih takut. Padahal dalam undang-undangnya kalau lapor harus jentel. Harus ada kejelasan identitas pelapor. Selama ini orang kalau mengadu pinginnya identitas tidak kelihatan, jadi masih enggan orang melapor
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Untuk masyarakat melapor bisa tapi untuk mengakses isi laporan itu kewenangan Tim Saber Pungli
			F	Kejati DIY	Ya	Karena kami secara online juga ada. Kan Sekretarisnya ada di Inspektorat. Ada nomor-nomor yang bisa dihubungi juga termasuk juga di kejaksaan juga
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	kami telah mesosialisasikan chanel-chanel yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian pungli
	P.3.1.2	Apakah sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan dilengkapi dengan petunjuk pelaporan secara jelas?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Menurut kami di website sudah ada petunjuknya secara jelas
			B	POLDA DIY	Ya	<ul style="list-style-type: none"> - Ada petunjuknya di internet - Sudah juga diutarakan dalam sosialisasi mau lapor ke kepolisian boleh, ke inspektorat boleh kemana saja yang ada secretariat saber pungli. Kalo di Polda ada unit Lidik ada unit Tindak ada unit sidiknya - Sistem pelaporannya fleksibel bisa lewat email, telpon. Laporan akan ditindaklanjuti dan pasti semua laporan ditindaklanjuti
			C	Inspektorat DIY	Ya	Namun terkait petunjuk bukan hal urgent bagi kita, sebagai contoh, ketika ada backdrop terpampang disana maka jelas mereka bisa menggunakan saluran yang disebutkan. Misal, mereka bertelepon ingin melaporkan, "Silahkan saja

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					namun bila Bapak/Ibu menganggap laporan itu penting silahkan diperkuat dengan secara tertulis, baik melalui surat atau email, sehingga laporan tersebut akan dimasukkan sebagai aduan dengan penegas secara tertulis. Artinya bila pengadu dapat berkomunikasi langsung maka kami akan arahkan lebih detil. Sebagai contoh; ada pengadu yang membaca Koran kemudian datang ke Inspektorat mengadukan bahwa ada Kepala Desa yang menarik uang ketika membagikan sertifikat prona, per sertifikat ada yang 100 ribu ada yang 200 ribu kalikan saja jumlah sertifikat yang dibagikan berapa. Kemudian kami minta, apakah Bapak bersedia membuat laporan tertulis? Si pelapor dengan senang hati bersedia. Dalam surat tertulis tersebut jelas pelakunya si A, si B, si C, kemudian laporan tersebut sebagai bahan awal untuk diserahkan ke unit penindakan atau penegakan di POLDA DIY atau Kejaksaan	
			D	Inspektorat Bantul	ya	Mudah silahkan buka sendiri di website
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Setau saya langsung aja menghubungi nomor sekretariat satgas saber pungli dan nanti akan diarahkan untuk menjelaskan diskripsi singkatnya, tempat kejadian dan waktunya atau kalau ada barang buktinya atau foto . Hal itu akan lebih efektif dan lebih cepat ditindaklanjuti
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.3.1.3	Apakah sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan memungkinkan <i>whistle-blower</i> mengetahui progress praktek pungli yang dilaporkannya?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Sampai saat ini belum ada yang lapor. Tapi bila ada yang melapor dia bisa
			B	POLDA DIY	Ya	Kalau lapor via internet dia bisa tau, kalo lapor lewat surat bisa bertanya. Bila kami tidak menindaklanjuti akan kena teguran dari Menkumham
			C	Inspektorat DIY	Ya	Setiap saat kami siap memberikan informasi pengaduan masyarakat terkait pungli yang dilaporkan. Seperti contohnya kasus sertifikat prona diatas, pelapor datang ke Inspektorat menanyakan sudah sejauh mana laporan pengaduannya? Maka kami jelaskan bahwa laporan tersebut

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					sudah ditelaah dan secara locus berada di kewenangan kabupaten, sehingga tim sudah bersurat ke Pemda Kabupaten melalui Tim Saber Pungli Kabupaten untuk dapat dilakukan penelaahan, bila penelaahan OK maka sebagai dasar bagi Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk menindak. Dari inspektorat juga memantau dan meminta informasi progress penanganan dari Pemda Kabupaten	
			D	Inspektorat Bantul	ya	Kita ada SOP berapa hari laporan harus dijawab. Bila ada yang lapor kita bahas dahulu memenuhi unsur pengaduan tidak, nanti bila memenuhi kita kabari
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Setiap Tim Satgas Saber Pungli dalam setiap menindaklanjuti laporan masyarakat harus membikin laporan perkembangan nanti kan ada kesimpulan akhirnya apakah ditindaklanjuti dengan dikembalikan ke instansi yang bersangkutan dan semacamnya, hal ini dapat disampaikan ke pelapor bila pelapor ngecek sejauh mana progress laporannya. Jadi semua jelas progressnya sampai dimana
			F	Kejati DIY	Ya	Karena penanganan pungli bersifat transparan artinya pihak-pihak terkait mengetahui karena akan dilibatkan ketika dilakukan pemeriksaan jadi otomatis berinteraksi langsung
			G	Inspektorat Kota Jogja		
	P.3.1.4	Apakah sistem <i>whistle-blowing</i> yang disediakan memungkinkan instansi terlapor mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya praktek pungli di wilayah kerjanya?	A	Inspektorat Sleman	Tidak	Bila ada yang melapor, si pelapor dirahasiakan kemudian bila terjadi indikasi maka dilakukan pemeriksaan. Justru inspektorat tidak menginformasikan ke sana. Inspektorat selaku APIP memberikan saran lewat Bupati , kemudian Bupati yang akan melakukan tindakan
			B	POLDA DIY	Tidak	Kita tidak pernah memberitahu tapi Keolisian mempunyai unit Lidik yang akan menyelidiki aduan masyarakat tersebut untuk mengetahui sejauh mana kebenarannya, bila ternyata benar maka akan dilakukan tindakan
			C	Inspektorat DIY	Tidak	Banyak aduan yang masuk Inspektorat terkait suatu OPD. Namun pada fase itu kami juga memiliki prosedur untuk

Konstruk	No	Pertanyaan		Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
						<p>menangani di internal pemda. Ketika laporan itu masuk maka kami mendapat disposisi pimpinan untuk mencari tau sejauh mana kebenaran laporan itu. Dalam mencari kebenaran tersebut berupa telaah awal (istilahnya Lidik kalau di Kepolisian). Kemudian bila telaah awal dinyatakan benar terjadi maka ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksaan Khusus, dan pemeriksaan tersebut ada ending terbukti atau tidak. Misal terbukti maka ASN yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi kedisiplinan sesuai aturan ASN yang bersangkutan. Contoh. Dalam sebuah penerimaan siswa baru di sebuah sekolah negeri ada pungutan tambahan 500 ribu s.d 1 juta, hingga terkumpul kurang lebih 600 juta. Maka setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim dan terbukti maka selain dilakukan penjatuhan sanksi kedisiplinan bagi ASN yang bersangkutan juga kami merekomendasikan untuk dikembalikan sesuai daftar pendaftar yang ditarik uang tambahan. Hal ini juga berawal dari aduan masyarakat tentang pungli, kami juga cek kebenaran identitas pelapor, bila pelapor berani mencantumkan identitas dan kontak personanya maka kami juga menilai bahwa pengadu tersebut serius.</p>
				D Inspektorat Bantul	Ya	
				E Kejari Kota Jogja	Ya	<p>Kita kasih tembusan laporannya, biasanya pimpinan terkait kita kasih tau bahwa ada praktek yang tidak benar disitu jadi nanti bisa dilakukan penindakan di internal dulu agar menghentikan tindakan itu kemudian dilakukan pencegahan misal oknum itu dipindahkan atau jabatannya dirubah atau ganti posisi itu bisa</p>
				F Kejati DIY	Ya	<p>Karena dalam salah satu kewenangan juga kita senantiasa berkoordinasi. Kan masing-masing instansi ada APIP. Yang diharapkan dalam terjadinya pungli ini akan dilihat, pelaku pungli ini masih bisa dilakukan pembinaan atau tidak. Efektivitas dan efisien dari penindakan itu harus dipertimbangkan. Lebih manfaat orang ini dibina atau dihukum. Jadi misalkan dalam penegakan hukum ini kita mau menyelamatkan kambing tapi mengorbankan sapi. Pertimbangannya dalam penegakan hukum juga ada</p>

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					pembiayaan tapi tidak juga mengabaikan efek jeranya. Biasanya kalau pelanggaran ketika dihadapkan dengan penegak hukum secara mental langsung jatuh	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Tidak	Misalnya ada yang melapor ke Inspektorat propinsi, kemudian Satgas yang ada di propinsi akan berkoordinasi dengan kami dalam memastikan kebenaran laporan tersebut bila pungli tersebut terjadi di instansi wilayah kota jogja. Bila telah dipastikan kebenarannya maka akan ada Tim Pemeriksa Khusus. Misal hasilnya terbukti maka akan dilimpahkan ke Satgas di kota untuk dilakukan penindakan dan pencegahan
	P.3.1.5	Apakah Saber Pungli memberikan perlindungan terhadap <i>whistle-blower</i> yang melaporkan praktek pungli?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Sudah menjadi kode etik kami
			B	POLDA DIY	Ya	Wajib
			C	Inspektorat DIY	Ya	Karena kami terdiri dari beberapa unit kerja maka kami masing-masing punya perlindungan terhadap pelapor baik yang di inspektorat, kejaksaan maupun di kepolisian. Kami sangat focus untuk mengclose identitas pelapor supaya tidak terpublish keluar
			D	Inspektorat Bantul	ya	Itu merupakan kewajiban undang-undang
			E	Kejari Kota Jogja	ya	Itu memang sudah kaidah umum karena masyarakat yang melapor memang mempunyai hak untuk dilindungi atas kerahasiaan, keselamatan dirinya dan keluarganya
			F	Kejati DIY	Ya	Sesuai bunyi pasal 12 perpres 87 tahun 2016 disitu dibunyikan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungli sangat dibutuhkan baik melapor secara langsung maupun melalui media elektronik dan untuk pelapor tidak perlu khawatir karena dalam pasal 4 ada kewenangan satgas Saber Pungli poin 6 yang berbunyi melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan pelapor dan merahasiakan identitas pelapor
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.3.1.6	Hal-hal lain terkait whistle blowing system	A	Inspektorat Sleman	Tidak ada	Sudah 2 tahun diterapkan tapi belum ada yang melapor, apakah sudah baik sudah tidak ada indikasi pungli atau takut

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
		menurut narasumber			rahasiannya tidak dijaga. Nanti akan dikaji bila kurang efektif akan ditempuh dengan cara lain agar para ASN dan masyarakat mdah dan mengetahui bagaimana melaporkanya. Kemungkinan juga belum ada yang mengetahui	
			B	POLDA DIY	Tidak ada	Kalau pungli ini kedua belah pihak ini penyelenggaraan layanan dan masyarakat harus sadar bahwa pungli jangan sampai terjadi karena akan menyebabkan biaya tinggi
			C	Inspektorat DIY	Ada	Suksesnya sistem pelaporan yang dipublish ke masyarakat itu adalah dilihat dari intensitas aduan masyarakat. Semakin meningkat intensitas aduannya maka sistem pelaporan tersebut semakin efektif. Tergantung chanel yang paling digemari yang mana kami belum mengerti tetapi Inspektorat telah membuka lewat berbagai macam media.
			D	Inspektorat Bantul	Ada	Tidak ada lagi kejadian pungli
			E	Kejari Kota Jogja	Ada	Karena sekarang ini kita masuk era digital semua pakai nomor hape maka saya rasa sangat efektif untuk era sekarang ini. Sementara lebih cepat daripada laporan manual yang datang langsung. Jadi indikatornya menurut saya kemajuan teknologi mas
			F	Kejati DIY	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Orang menjadi berani melapor tidak takut - Jumlah pelapor menjadi bertambah - Hasil pelaporan dapat ditindaklanjuti sesuai aturan
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ada	Semakin banyaknya masyarakat menggunakan chanel untuk melapor maka sistem whistleblower ini efektif
Operasi Tangkap Tangan (OTT)	P.4.1.1	Apakah OTT telah ditetapkan dengan standar operasional prosedur yang jelas?	A	Inspektorat Sleman	Ya	Sudah ada SOPnya
			B	POLDA DIY	ya	
			C	Inspektorat DIY	Ya	Ada sistem dan prosedur satgas saber pungli. Sebetulnya satgas saber pungli mempunyai dua orientasi aktivitas. Pertama aktivitas yang terkait fungsi unit kerja, contohnya Inspektorat, Kepolisian dan Kejaksaan, pasti semuanya mempunyai prosedur-prosedur penanganan itu. Orientasi kedua bahwa sebetulnya satgas saber pungli itu adalah

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					Collective Colegial. Artinya ketika ada laporan unit-unit kerja tersebut tidak bisa memiliki ego sektoral, misal ini ditangani kepolisian sendiri, ini inspektorat sendiri, kejaksaan sendiri, itu tidak bisa. Kalau ada laporan harus dibahas bersama kemudian dikaji, ini kira-kira melibatkan aparat mana ya? Apakah kepolisian atau penegak hukum atau dari pemda, jika misal itu menjadi ranah pemda maka disepakati Inspektorat yang jalan. Apabila collective Colegial tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terhambat satu dan lain hal, maka diserahkan sesuai kewenangan masing-masing unit kerja. Jadi sebelum ada OTT diupayakan ada Collective Colegial tersebut, sehingga bila Collective Colegial dapat berjalan dengan efektif maka tidak perlu ada OTT.	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	OTT saat ini sudah dilakukan sesuai aturan. Ada payung hukumnya namun akan lebih baik lagi dipersiapkan lagi prosedurnya yang lebih jelas agar jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum
			F	Kejati DIY	Belum ada	<p>Saber pungli OTT belum ada tapi entah kalau di Kepolisian. Kalau berdasarkan fungsi Satgas Saber Pungli yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fungsi Intelijen - Fungsi Pencegahan - Fungsi Penindakan - Fungsi Yustisi <p>Untuk Kejaksaan lebih pada Fungsi Yustisi ini, namun dalam fungsinya sebagai penindakan Kejaksaan dapat memberi masukan setelah berkas masuk ke Kejaksaan, terkait tindakan apa yang akan dikenakan kepada pelaku misal cocoknya pasal apa, apa ini pungli atau bukan, pelanggaran atau kejahatan Operasi tangkap tangan harus dipahami bukan direncanakan</p>

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.4.1.2	Apakah OTT melibatkan pihak-pihak terkait? (misal : Kejaksaan dan Polri)	A	Inspektorat Sleman	Ya	Ya karena di dalam Saber Pungli dibentuk pokja-pokja. Di dalam masing-masing pokja terdapat 3 unsur dari pemda, kepolisian dan kejaksaan. Tiap pokja berarti mengemban setiap fungsi dalam saber pungli, misal Pokja Pencegahan ada 3 unsur tersebut dan seterusnya
			B	POLDA DIY	Ya	Polisi tidak berdiri sendiri, satgas saber pungli ada kejaksaan tinggi ada inspektorat dan Forkombinda ada BIN juga
			C	Inspektorat DIY	Ya	Khusus di DIY belum ada OTT secara Collective Collegial , tapi di salah satu kabupaten pernah ada. Di luar Jawa juga pernah ada. Jadi OTT secara collective collegial tersebut dilakukan secara bersama-sama dari ketiga unit kerja dan melibatkan semua unit dari Tim Satgas Saber Pungli yang terdiri unit pencegahan, unit penindakan dst. Ada budaya yang berbeda yakni lebih senang dengan pendekatan collective collegial tadi karena secara teknis ngebaknya juga bareng.
			D	Inspektorat Bantul	Ya	Iya tapi terbatas hanya tim satgas saber pungli
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Di kota Jogja ini sudah ada beberapa elemen instansi yang terlibat saya rasa bila semua dapat berjalan dan berkoordinasi dengan baik sudah cukup tidak perlu tambahan dari pihak lain karena sudah mengcover dari pemda, penegak hukum yang termasuk dalam Tim Satgas. Minimal ada perwakilan dari unit penindakan, unit pencegahan dan Yustisinya. Jadi sebagian besar hanya anggota pokja yang masuk
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.4.1.3	Apakah OTT diperlukan dalam untuk	A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
		menemukan kesesuaian bukti laporan dugaan praktek pungli untuk diproses di pengadilan?	C	Inspektorat DIY	Tidak	OTT bukan dalam rangka menemukan kesesuaian bukti namun dalam rangka menangkap situasi. Untuk kegiatan verifikasi kesesuaian bukti tersebut dilakukan pasca OTT, selama perjalanan proses dari Kepolisian ke Kejaksaan. Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan pada P21 sudah harus dilengkapi semua
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	karena untuk pembuktian tipikor pembuktian paling cepat adalah lewat OTT. Kalau kita menyidik dari awal secara pelan-pelan kita belum menjangkau ke pelaku bisa kehilangan data-data atau barang bukti karena sudah dihilangkan oleh mereka dan saksi-saksi dikondisikan sedemikian rupa, misal saksi yang diperiksa nanti satu suara
			F	Kejati DIY	Ya	Karena dengan adanya OTT sebuah peristiwa masih segar terjadi dan 90% barang bukti belum berubah. Misal sedang transaksi pungli ketika disergap uang sedang diserahkan barang buktinya ada yaitu sejumlah uang transaksi tersebut dan si pelaku tidak bisa menyangkal juga. Na kegunaan OTT disitu
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Karena dengan OTT pelaku tidak dapat mengelak, barang bukti juga apa adanya. Walaupun saat ini kita lebih mengedepankan pencegahan/preventif supaya tidak sampai perlu ada OTT.
	P.4.1.4	Apakah OTT dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi terhadap laporan dugaan praktek pungli?	A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	Bisa dari laporan masyarakat Bisa dari pengembangan Tim Saber Pungli dimana keduanya telah dilakukan pendalaman oleh Unit Lidik
			C	Inspektorat DIY	Ya	Baik secara collective collegial maupun ego sektoral
			D	Inspektorat Bantul	Ya	Di kabupaten kan ketuanya pak Wakapolres, wakilnya Kepala Inspektorat, ada tim pencegahan, tim penindakan maka kedua tim itu yang muter dulu, kurang lebih seminggu untuk menentukan kebenaran laporan. OTT itu hanya sepenggal kisah dan kisah-kisah sebelum OTT itu cukup bikin pusing kepala, gimana mengincarnya, gimana

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
						prakteknya, lokasinya dimana saja. Sampai betul-betul yakin baru dilakukan OTT
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	<ul style="list-style-type: none"> - Bisa ada pengkajian dulu terhadap laporan kemudian dilakukan OTT - Namun juga bisa tidak melalui tahap itu jika ketika anggota Satgas sedang berada di lapangan dan menemukan kasus pungli bisa melakukan tindakan atau secara spontan. Setelah itu satgas saber pungli dapat menentukan sikap lewat ketuanya itu apakah dikembalikan ke instansi yang bersangkutan atau dilakukan pembinaan cuman tidak serta merta masuk ke penuntutan jika masih bisa dilakukan fungsi pencegahan
			F	Kejati DIY	Ya	OTT bisa dilakukan setelah ada laporan yang dikaji atau juga bisa ketika dialami oleh petugas itu sendiri (Satgas Saber Pungli) secara spontan
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Seperti pada pertanyaan whistle blower tadi. Sebelumnya kami harus mengecek dulu kebenaran laporan tersebut
	P.4.1.5	Hal-hal lain terkait OTT dalam pemberantasan pungli menurut narasumber	A	Inspektorat Sleman	Tidak Ada	
			B	POLDA DIY	Tidak Ada	
			C	Inspektorat DIY	Ada	Tidak semua unit kerja dalam kondisi tertentu memblow up apa adanya, seperti halnya kasus pidana umumnya misal jumlahnya nggak signifikan kemudian menyangkut orang-orang tertentu dalam sistem birokrasi pemerintahan, maka sedikit banyak akan dikesampingkan, hanya ditangani dan selesaikan pada fase awal saja kalau bisa tidak sampai pada OTT, misal pada fase penindakan apalagi fase yustisi tidak mungkin. Hal tersebut masih ada mas. Contoh kendaraan mel memuat pasir. Masyarakat cukup cerdas, mereka ada portal dan menghitung berapa jumlah truk yang lewat sehari. Tapi berapa laporan yang masuk dari penambang ke dinas PU relative lebih sedikit. Akhirnya laporan tersebut sampai ke kejaksaan maka dilakukan fase selidik dulu. Ternyata di balik itu ada orang-orang penting seperti

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
					anggota dewan dan sebagainya. Akhirnya tindakan yang dilakukan yang bersangkutan dipanggil namun untuk diajak rembugkan untuk menyelesaikan kekurangan dan himbauan untuk menaati aturan yang berlaku tidak sampai dilakukan OTT. Kesimpulannya selain OTT juga ada pendekatan lain seperti pertimbangan politis.	
			D	Inspektorat Bantul	Ada	Sebenarnya terlalu banyak OTT itu tidak bagus, berarti sistem pengendalian internnya tidak berjalan. OTT bisa menjadi Triger bagi pimpinan untuk aware terhadap pengendalian intern, kalau ada OTT dia akan bangun, ngecek satu per satu, SOPnya gimana, SPnya gimana biar tidak terjadi lagi. OTT itu di depannya hasilnya kecil tapi dibelakangnya bisa seperti gunung
			E	Kejari Kota Jogja	Ada	OTT lebih cepat dalam menemukan barang bukti dan lebih riil dengan kondisi praktek pungli yang ditemukan
			F	Kejati DIY	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Kasus pungli yang tertangani menjadi lebih banyak - Meningkatnya ketertiban orang untuk tidak melakukan pungli - Memunculkan rasa enggan atau takut dilaporkan
			G	Inspektorat Kota Jogja	Tidak Ada	
Pengaruh adanya Satgas Saber Pungli terhadap Intensi Pungli	P.5.1	Apakah dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli dapat memberikan efek psikologis “merasa dawasi” bagi aparat yang bertugas di area rawan pungli?	A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	Mungkin dengan sebelum adanya Satgas pengawasan internal bisa lebih lunak jadi oknum tidak merasa takut dan dengan adanya Satgas Saber Pungli yang memiliki kewenangan penindakan dan penuntutan maka akan mengurangi niatan oknum untuk melakukan pungli
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota	Ya	

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
				Jogja		
	P.5.2	Pengaruh lain adanya Satgas Saber Pungli terhadap intensi pungli	A	Inspektorat Sleman	Tidak Ada	
			B	POLDA DIY	Ada	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pungli termasuk tidak memberikan kepada aparat, baik aparat sipil maupun polri untuk tidak melakukan suap, karena pungli itu sama dengan suap kalau yang memberi dari masyarakat
			C	Inspektorat DIY	Ada	Teman-teman di pemda yang bertugas di area rawan pungli maka akan lebih berhati-hati lagi. Artinya harapan kami mereka tidak berani untuk melakukan pungli. Nanti silahkan dilihat di internet pemetaan wilayah atau lokasi yang berpotensi rawan pungli. Misal yang berkaitan dengan rekrutmen di area UPTD-UPTD . Contoh Balai Sertifikasi Benih. Benih dari masyarakat yang akan dipublish dan dikonsumsi umum selalu harus lolos disertifikasi dulu walupun kualitas kurang bagus contoh di PTSP perijinan, atau di PU, Samsat
			D	Inspektorat Bantul	Ada	Munculnya kesadaran pribadi untuk tidak melakukan pungli, dia kan tidak tahu kapan Satgas Saber Pungli datang
			E	Kejari Kota Jogja	Ada	Mendukung fungsi tugas kantor menjadi baik dan benar dengan adanya Satgas saber Pungli
			F	Kejati DIY	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya ketertiban orang untuk tidak melakukan pungli - Memunculkan rasa enggan atau takut dilaporkan
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	Adanya Satgas ini membuat para aparat pemerintah lebih berhati-hati dalam bekerja. Karena mereka nggak tau kapan dan bagaimana Satgas bisa mengawasi dan mendapatkan bukti dugaan pungli.
Whistle Blowing System yang	P.6.1	Apakah peningkatan peran aktif masyarakat dalam melapor melalui sistem <i>whistle-blowing</i>	A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	Adanya saber pungli memberikan masyarakat untuk turut serta kalau ada pungutan liar masyarakat ikut memberikan pengawasan termasuk memberikan laporan / masukan

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
efektif terhadap intensi pungli		yang telah berjalan efektif dapat mengurungkan niat para oknum melakukan praktek pungli?				bahwa suatu area terjadi pungli
			C	Inspektorat DIY	Ya	
			D	Inspektorat Bantul	Ya	
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	<ul style="list-style-type: none"> - Karena masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih berani - Kemudian laporan sudah lebih jelas apalagi ada perlindungan bagi pelapor - Maka oknum-oknum akan berfikir 2 kali untuk melakukan pungli
			F	Kejati DIY	Ya	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
			P.6.2	Pengaruh lain dari Efektif Whistle Blowing terhadap Intensi Pungli	A	Inspektorat Sleman
		B	POLDA DIY	Tidak Ada		
		C	Inspektorat DIY	Ada	masyarakat pada level terbawahpun melihat ini sebagai peluang kemudahan, sebelumnya 3 tahun lalu paling banter orang hanya berkirin surat, sekarang sudah berani kirim email, sudah berani datang kemari dan sebagainya. Artinya saat ini keberanian orang untuk melapor itu tidak hanya dari kalangan terpelajar. Orang dari kalangan level terbawahpun berani melapor. Dengan demikian sarana pelaporan yang baik dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam turut memberantas pungli. Ditanya dari mana informasinya katanya dari membaca bernas.	
		D	Inspektorat Bantul	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Pegawai jadi meningkatkan sikap kehati-hatian. - Whistle blower kita itu sistemnya masih manual sekali, hanya orang yang bernyali yang berani masuk kesitu, akibatnya variasi kontennya kurang, kita baru mempelajari supaya bagaimana caranya yang mensaring dari Saber Pungli, masyarakat bebas mengadu, tanpa ada pengadunya asal substansinya 	

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan		Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)
						jelas tetap akan ditindaklanjuti. Kalau basis email masih ada rasa takut kalau dicek emailnya siapa walaupun sebenarnya kalau mau dicek nomor hp lebih mudah.
			E	Kejari Kota Jogja	Tidak Ada	
			F	Kejati DIY	Tidak Ada	
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ada	hampir sama dengan adanya Satgas tadi para aparatur pemerintahan juga akan lebih berhati-hati dalam bekerja karena orang yang dilayani dapat melaporkan bila mereka mempungli
Pengaruh adanya Satgas Saber Pungli terhadap Intensi Pungli	P.7.1	Apakah dengan adanya OTT mampu memberikan “efek jera” bagi bagi aparatur yang bertugas di area rawan pungli?	A	Inspektorat Sleman	Ya	
			B	POLDA DIY	Ya	Ada dampak tetapi tidak satu satunya
			C	Inspektorat DIY	Ya	OTT dimanapun dan bentuk apapun
			D	Inspektorat Bantul	Ya	Terutama untuk lingkup yang terkena OTT Tetapi jera 100% tidak
			E	Kejari Kota Jogja	Ya	
			F	Kejati DIY	Tidak	Sebenarnya kalau dalam ilmu hukum tidak mengenal teori efek jera. Karena yang dibilang jera itu relative. Contoh ada orang dihukum 5 tahun yang satu dihukum 3 bulan. Ketika kita menilai relatif ada yang 3 bulan dihukum sudah kapok. Kapoknya amit-amit, tapi bisa juga yang dihukum 5 tahun juga belum kapok dan mengulangi lagi
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ya	
	P.7.2	Pengaruh lain OTT terhadap intensi Pungli	A	Inspektorat Sleman	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merubah perilaku bagi personel yang diikuti dengan pengawasan - Dapat meningkatkan intensnya pengawasan intern diikuti dengan pedoman dan SOP yang harus dikendalikan pelaksanaanya

Konstruk	No	Pertanyaan	Informan	Jawaban	Uraian Jawaban (Bila Ada)	
			B	POLDA DIY	Ada	Paling efektif adalah pengawasan internal di masing-masing institusi, pemerintah dan stakeholder hingga tingkat Desa. Sampai desa itu termasuk aturannya juga diatur dan dilakukan pengawasan
			C	Inspektorat DIY	Ada	Ketika tidak terjadi OTT maka dapat digunakan sebagai indikator meningkatnya kinerja pemda. Artinya tidak diwarnai hal-hal seperti pungli-pungli. Dapat menunjukkan level integritas birokrasi yang lebih baik. Wong kita ini memberi pelayanan kalau ada kejadian semacam OTT malah jadinya ngrusuh-ngrusuhi, kerja juga lebih tenang
			D	Inspektorat Bantul	Ada	Adanya OTT juga mendorong untuk perbaikan sistem, oleh karena itu sistem yang dibangun secara online agar pemohon dan yang melayani tidak pernah ketemu. Hal ini termasuk upaya untuk menekan terjadinya pungli walaupun punglinya belum hilang.
			E	Kejari Kota Jogja	Ada	Rasa malu secara sosial dia dapat sangsi sosial
			F	Kejati DIY	Ada	Efek psikologis bagi masyarakat artinya dampak bagi yang lain. Jadi masyarakat yang lain yang belum berbuat tidak coba-coba untuk melakukan pungli
			G	Inspektorat Kota Jogja	Ada	Kalau terjadi OTT di lingkungan instansi di daerah yang buruk citranya tidak hanya instansinya, bahkan pemdanya pun ikut malu. Sehingga OTT ini berpengaruh bagi Pimpinan Instansi untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan internal